

**POLA PEMBINAAN INOVASI DAERAH OLEH BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG)
DI KABUPATEN BINTAN**

Raja Abumanshur Matridi¹, Shahril Budiman², Junriana³

¹Program Studi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji, Tanjung Pinang, Indonesia

^{2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji, Tanjung Pinang, Indonesia

¹ Korespondensi Author e-mail: matridi_aeksalo@yahoo.com

Diterima : 04012023

Direvisi: 15032023

Disetujui: 05042023

ABSTRACT

The Bintan Regency government's commitment to implementing Regional Innovation is contained in Regent Regulation No. 48 of 2020. Regional innovation coaching is a very important aspect to be implemented in each regional apparatus organization to maintain the sustainability of the innovation climate. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The research subjects were the coaching team at Bapelitbang, implementor and facilitator teams and regional apparatus organization who were the target groups for fostering regional innovation. Furthermore, the determination of informants was determined based on the involvement of informants on regional innovation development activities. The data collection method was carried out through primary data, namely interviews and also using secondary data related to this research. Data analysis used qualitative narrative analysis using simple qualitative methods. This study aims to find out the pattern of coaching regional innovation by BAPELITBANG of Bintan Regency. The results of the research show that the coaching pattern carried out by Bapelitbang is in accordance with the duties, principals and functions. The availability of existing Human Resources can be optimized to carry out coaching to all of regional apparatus organization and Communities in Bintan Regency. However, there are innovations that last only temporarily and there is no sustainability due to innovation management factors and environmental support. Therefore, the need for regional apparatus organization and individual (employee) commitment to maintain a climate of innovation not only producing new innovations but also maintaining and caring for existing ones is a shared obligation and responsibility.

Keywords: *Regional Innovation, Regional Innovation Coaching, Local Government, Bintan Regency*

ABSTRAK

Komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam melaksanakan Inovasi Daerah tertuang melalui Peraturan Bupati No.48 Tahun 2020. Pembinaan inovasi daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diterapkan di setiap organisasi perangkat daerah untuk menjaga keberlanjutan iklim inovasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian yaitu tim pembina di Bapelitbang, pengelola dan tim fasilitator serta OPD yang menjadi kelompok sasaran pembinaan inovasi daerah. Selanjutnya penentuan informan ditetapkan berdasarkan keterlibatan informan atas kegiatan pembinaan inovasi daerah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu wawancara dan juga menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis naratif kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif sederhana. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pola pembinaan inovasi daerah oleh BAPELITBANG di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan yang dilaksanakan oleh Bapelitbang telah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada dapat dioptimalkan untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh OPD dan Masyarakat di Kabupaten Bintan. Sosialisasi yang masif baik yang dilaksanakan secara offline dan online, adanya tim fasilitasi inovasi yang melibatkan akademisi, kegiatan Galanova sebagai ajang pemberian reward merupakan metode yang diterapkan oleh Bapelitbang untuk tetap menjaga budaya Inovasi tetap tumbuh di Kabupetan Bintan. Namun demikian, terdapat inovasi yang bertahan hanya sementara dan tidak ada keberlanjutan yang disebabkan karena faktor pengelola inovasi dan dukungan lingkungan. Oleh karena itu, perlunya komitmen OPD dan individu (pegawai)

untuk menjaga iklim inovasi. bukan hanya menghasilkan inovasi yang baru tetapi juga menjaga dan merawat yang sudah ada merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama.

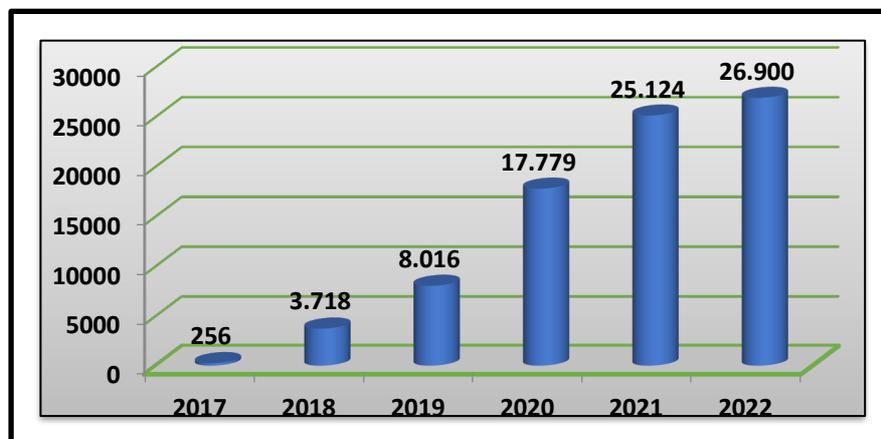
Kata kunci: Inovasi Daerah; Pembinaan Inovasi Daerah; Pemerintah Daerah; Kabupaten Bintan.

PENDAHULUAN

Inovasi merupakan bagian integral dalam sebuah organisasi dan juga merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki dan diterapkan oleh sebuah organisasi (Noor, 2013; Sobandi, 2019). Perubahan dan perkembangan zaman yang semakin modern mengharuskan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah untuk mampu beradaptasi agar dapat meningkatkan kinerja dan mensejahterakan masyarakat. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari kontribusi atas kehadiran inovasi diberbagai bidang seperti inovasi dibidang teknologi dan informasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang industri dan sebagainya. Pelaksanaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan inovasi daerah telah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang merupakan pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan inovasi daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai laju pertumbuhan dan perkembangan bagi daerah serta untuk dapat meningkatkan daya saing daerah (Matridi et al., 2021).

Mengacu pada grafik 1. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan inovasi daerah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mampu mendorong agar pemerintah daerah untuk berinovasi dan terus berinovasi.

Grafik.1. Pertumbuhan Inovasi Daerah Secara Nasional Tahun 2017-2022

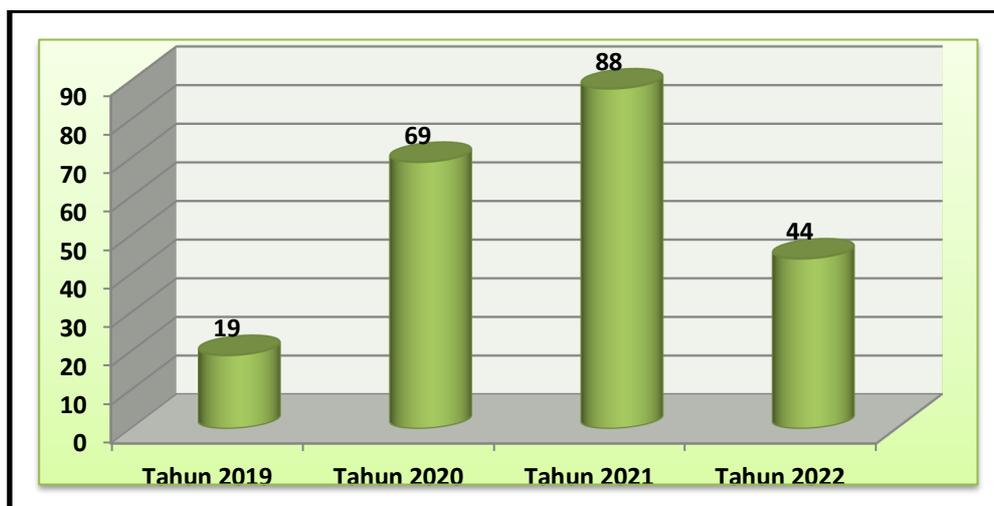


Sumber: Prepared from the State Policy Strategy Agency (BSKDN) of the Ministry of Home Affairs (Budiman, S., et al, 2022).

Pertumbuhan inovasi yang signifikan di Indonesia ini belum mampu mengangkat posisi Indonesia pada tingkat global. Berdasarkan publikasi Global Innovation Index (GII) pada tahun 2021, posisi Indonesia mengalami penurunan 2 tingkat yaitu menduduki peringkat ke 87 pada tahun 2021 dan peringkat 85 pada tahun 2020 (Cornell University, INSEAD, dan World Intellectual Property Organization (WIPO 2020; Cornell University, INSEAD, dan World Intellectual Property Organization (WIPO 2021;)). Posisi Indonesia jauh tertinggal dari negara ASEAN seperti Singapura yang konsisten menempati peringkat ke 8 dunia, Malaysia pada peringkat 36, Thailand dan Vietnam pada peringkat 43 dan 44, Philippines dan Brunei Darussalam pada peringkat 51 dan 82. Berkaca pada data Global Innovation Index tentunya Indonesia punya pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Peringkat Indonesia yang menurun tersebut tentunya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah untuk mendorong dan membangun iklim inovasi agar dapat mengejar posisi negara ASEAN dan Asia Tenggara (Shahril Budiman et al., 2021).

Keutamaan berinovasi adalah agar dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengarah pada serangkaian percepatan dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui (a) peningkatan pelayanan publik, (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan (c) peningkatan daya saing daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017). Kemendagri telah menyelenggarakan pendataan inovasi daerah yang ada di setiap pemerintah daerah pada kegiatan Indeks Inovasi Daerah setiap tahunnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan sendiri telah berinovasi sejak lama namun belum terdata dengan baik.

Grafik.2. Jumlah Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2022



Sumber: Bapelitbang Kabaupaten Bintan & P3M STISIPOL Raja Haji, 2022; Budiman, et al, 2022

Pada tahun 2019 terdapat 19 Inovasi namun tidak dilaporkan ke KEMENDAGRI. Inovasi baru dilaporkan sejak tahun 2020 sebanyak 69 inovasi dan pada tahun 2021 teridentifikasi sebanyak 212 inovasi. Setelah melalui proses verifikasi hanya tinggal 88 inovasi yang bisa dilaporkan ke Kemendagri. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah inovasi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana teridentifikasi sebanyak 183 inovasi. Selanjutnya Setelah melalui proses verifikasi hanya tinggal 44 inovasi daerah yang bisa dilaporkan ke Kemendagri untuk mengikuti ajang Innovation Government Award (IGA) tahun 2022.

Sejak diterbitkan Peraturan Bupati No 48 tahun 2020, perangkat daerah diwajibkan untuk menghasilkan inovasi minimal 1 inovasi daerah. Terjadi peningkatan keterlibatan perangkat daerah untuk melaporkan inovasinya masing-masing dalam 4 tahun terakhir. Namun demikian, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum mampu berinovasi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan jumlah inovasi daerah yang signifikan pada tahun 2022. Dengan demikian, hal ini tentu menarik untuk mengkaji pembinaan inovasi daerah yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka menjaga iklim inovasi. Tujuan pada penelitian yaitu untuk mengetahui pola pembinaan inovasi daerah yang merupakan instrumen pendorong untuk menghasilkan inovasi di Kabupaten Bintan. Urgensi penelitian ini adalah untuk menghasilkan gambaran umum dan khusus dari pola pembinaan inovasi daerah dalam rangka untuk pembangunan dan penguatan sosial budaya dengan topik riset pada Tatakelola dan pemerintahan pada pemerintahan Kabupaten Bintan

METODOLOGI

Pada pelaksanaan kajian ini peneliti telah memilih dan menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Bintan. Pemilihan ini disebabkan karena Kabupaten Bintan merupakan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat memenangkan Innovative Government Award (IGA) selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 pada kategori Kabupaten Wilayah perbatasan dengan capaian sebagai Kabupaten terinovatif.

Selanjutnya, yang menjadi Objek dalam studi ini tentunya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) yang merupakan salah satu pembina dan pengelola inovasi di Kabupaten Bintan. Lebih lanjut, seluruh perangkat daerah dan pengelola inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bintan dan tentunya lembaga dan individu yang menghasilkan ide dan gagasan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Sedangkan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang mana informan yang ditetapkan merupakan orang-orang yang memahami

konteks penelitian ini seperti tim pengelola dan tim pembina yang ada di Bapelitbang dan tim fasilitator inovasi daerah. Selain itu, tim pengelola inovasi yang ada di organisasi perangkat daerah juga merupakan informan dalam penelitian ini. Penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam terhadap pembinaan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Bapelitbang.

Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara bersama informan yang terkait dengan pola pembinaan yang telah dilakukan. Kajian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) bersama informan-informan terpilih dan selanjutnya tim peneliti melakukan observasi partisipan dengan waktu yaitu selama 2 bulan. Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini didapatkan melalui regulasi, laporan-laporan dari Pemerintah Kabupaten Bintan dan publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat berupa buku, jurnal dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Inovasi dan Inovasi Daerah

Inovasi bukanlah sesuatu yang asing saat ini. Sudah banyak para cendekiawan di dunia telah membahas dan mendiskusikan tentang Inovasi. Keberadaan inovasi telah terbukti dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat dunia. Inovasi merupakan sebagai sebuah ide, gagasan, praktek ataupun suatu objek yang dapat dikatakan dan dianggap sesuatu yang baru bagi individu atau kelompok. Selanjutnya pengertian Inovasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sektor publik (Matridi et al., 2021). Secara umum Inovasi merupakan suatu upaya dalam menciptakan produk dan jasa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui ide atau gagasan baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Inovasi tentunya tidak harus seluruhnya memiliki sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat berupa pembaharuan dari sebagian inovasi yang ada seperti adanya perubahan cara kerja yang lebih praktis dari sebelumnya (Matridi et al., 2021). Berdasarkan pendapat Everett M. Rogers menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa suatu yang berwujud (*tangible*) dan sesuatu yang tidak berwujud (*intangible*) (Rahman & Tarigan, 2020; Sumirat, 2019).

Secara esensial Ayodha Pramudita menjelaskan bahwa inovasi dapat diartikan untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan keunggulan; mudah bagi pengguna layanan, mudah bagi pelaku dan mudah pula bagi tata kelola organisasi (Pramudita, 2020). Berdasarkan keragaman pendapat tentang inovasi, Yogi Suwarno menjelaskan bahwa inovasi identik dengan hal seperti (1).

Pengetahuan baru; (2). Cara baru; (3). Objek baru; (4). Teknologi Baru; dan (5). Penemuan baru (Noor, 2013; Sumirat, 2019). Selanjutnya, Inovasi Daerah adalah Semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP Nomor 38 Tahun 2017; UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pola Pembinaan Inovasi Daerah

Pembinaan adalah disiplin profesional yang menawarkan metodologi dan pendekatan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional dan menyediakan alat dan teknik untuk memfasilitasi perubahan dan untuk meningkatkan kinerja. Pembinaan juga dapat didefinisikan sebagai proses pendampingan seorang individu dalam mencari jawaban seputar masalah atau tujuan menggunakan pertanyaan dan asumsi yang menantang (Bianchi & Steele, 2014). Sehubungan dengan pembinaan inovasi daerah maka dapat dijelaskan bahwa suatu proses pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan melalui Bapelitbang baik kepada individu, kelompok atau Organisasi Perangkat Daerah untuk menguraikan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi agar dapat meningkat kinerja dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan inovasi telah banyak dilakukan di Indonesia seperti Irwan Noor yang membuat kajian desain inovasi pemerintahan daerah dengan menegaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi desain inovasi yaitu (1). Kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan dan visi kepemimpinan, (2). Iklim Organisasi yang terdiri dari struktur organisasi dan penghargaan, dan (3). Lingkungan Politik yang terdiri dari partai politik dan asal politik pimpinan daerah (Noor, 2013). Selanjutnya, penelitian Rahmawati menjelaskan pentingnya sinergitas antar stakeholders dalam menerapkan inovasi daerah (Rahmawati et al., 2014). Resen melalui penelitiannya lebih memfokuskan pada aspek regulasi yang menekankan penting keberadaan regulasi untuk mengatur pelaksanaan inovasi daerah (Resen, 2015). Dan masih banyak peneliti yang telah melakukan kajian yang berkaitan dengan inovasi namun masih minimnya kajian yang memfokuskan pentingnya melakukan pembinaan inovasi daerah.

Khusus untuk Kabupaten Bintan, Penelitian inovasi yang sudah dilaksanakan sejauh ini baru membuat kajian tentang penerapan inovasi daerah (Matridi et al., 2021) dan Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan (Budiman et al., 2021). Untuk penelitian model pembinaan telah dilakukan oleh Taufiqurrahman dan kawan-kawan namun kajian tersebut lebih memfokuskan pada model pembinaan dan pengembangan kemampuan inovasi produk (Taufiqurrahman et al., 2011). Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasikan dan lebih memfokuskan pada pembinaan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga keberlanjutan iklim inovasi di Kabupaten Bintan.

Adapun yang dimaksud dengan pembinaan inovasi daerah yaitu suatu usaha yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada stakeholders dalam rangka mendorong stakeholders untuk berinovasi sesuai dengan capaian inovasi daerah yang dicapai berdasarkan hasil indeks inovasi daerah. Pembinaan inovasi daerah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi stakeholders untuk terus berinovasi dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun aktivitas pembinaan inovasi daerah mengacu pada 8 bentuk (Balitbang Kemendagri, 2020). yaitu: (1). Forum Komunikasi. Forum komunikasi merupakan sebuah bentuk jaringan komunikasi teknis inovasi lintas pemangku kepentingan dalam bidang urusan pemerintahan tertentu. Kegiatan yang dapat dilakukan pada forum komunikasi ini seperti kegiatan sosialisasi peraturan yang menyangkut dengan inovasi daerah, sosialisasi sehubungan dengan kegiatan inovasi daerah dan sebagainya; (2). Fasilitasi kebijakan inovasi daerah. Fasilitasi kebijakan inovasi daerah dilaksanakan dengan memfasilitasi lahirnya regulasi praktis berbasis akademik guna mendukung kelancaran penyelenggaraan inovasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan; (3). Diseminasi. Diseminasi ini dilaksanakan bertujuan agar menyebarluaskan praktik-praktik baik (*best practices*) yang telah dihimpun oleh Bapelitbang secara periodik; (4). Pengembangan digitalisasi. Pengembangan digitalisasi inovasi daerah dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan platform e-government guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; (5). Kolaborasi inovasi. Kolaborasi inovasi dilakukan dengan menyajikan transfer pengetahuan dan teknologi guna mengupayakan penciptaan inovasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah; (6). Pemberian penghargaan inovasi daerah. Bapelitbang secara periodik melakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepada OPD yang dinilai inovatif dalam penyelenggaraan yang menjadi urusan pemerintahan daerah; (7). Pendampingan proposal. Pendampingan proposal inovasi daerah merupakan suatu bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menstimulasi lahirnya peraturan inovasi pada tingkat lokal; dan (8). Bimbingan teknis inovasi daerah. Bimbingan teknis inovasi daerah dilaksanakan dengan cara penyediaan ruang untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan terkait dengan penciptaan inovasi sesuai dengan bidang urusan pemerintah daerah.

Rosha & Lace mendeskripsikan bahwa didalam pembinaan terbagi menjadi dua poin utama yaitu adanya sejumlah pelatih (*number of coaches*) yang terdiri dari *individual dan group level* dan *scope of application* yang terdiri dari *personal sphere* dan *work and employment sphere* (Roša & Lace, 2018). Didalam *group level* terdapat *group coaching* dan *team coaching* yang dapat menjadi kunci utama dalam melakukan aktivitas pembinaan. Peran pembina akan menjadi krusial untuk mencapai tujuan pembinaan. Selain itu, tentunya partisipasi dari kelompok sasaran yang akan

mendapatkan pembinaan merupakan aktor utama agar perubahan dan peningkatan kemampuan baik secara individu maupun tim dapat tercapai. Pembinaan tim memfasilitasi peningkatan kemampuan tim untuk melakukan dan mencapai hasil tim. Dengan menerapkan pola interaksi pembinaan ini dapat menghasilkan inovasi daerah menjadi lebih berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Bintan sendiri telah menerbitkan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan inovasi daerah melalui Peraturan Bupati Bintan Nomor 48 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bintan. Bupati Bintan juga telah menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan dapat melaksanakan percepatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan ketentuan bahwa seluruh OPD memiliki kewajiban untuk menghasilkan inovasi sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah setiap tahunnya (Bapelitbang Kabaupaten Bintan & P3M STISIPOL Raja Haji, 2021). Dengan demikian, untuk mencapai hal tersebut maka bapelitbang perlu berperan aktif untuk membimbing dan memberikan pendampingan serta melakukan pembinaan kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten agar mampu menghasilkan inovasi setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Bupati yang telah diterbitkan pada tahun 2020 terdapat pasal yang mengatur tentang pembinaan inovasi daerah yaitu pada Bab VIII Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi bahwa pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah perangkat daerah dilaksanakan oleh Bupati dan ayat 2 yang berbunyi bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui oleh bapelitbang dan TPIK (Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022). Mangacu pada ketentuan umum pasal 1 nomor 10 bahwa Tim Penilai Inovasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian Pelaksanaan Inovasi Daerah. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian sementara maka pola pembinaan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Bapelitbang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tim fasilitator Inovasi Daerah Kabupaten Bintan

Tim fasilitator inovasi daerah merupakan tim yang memiliki tugas untuk menyediakan informasi daerah melalui sistem elektronik dan profil inovasi daerah. Selain itu, tim ini tentunya untuk melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada setiap OPD yang berhubungan dengan inovasi daerah. Berdasarkan hasil pengumpulan data baik melalui hasil observasi dan wawancara maupun melalui data sekunder maka dapat dijabarkan bahwa tim fasilitator inovasi daerah kabupaten terbagi menjadi 2 yaitu tim fasilitator internal dan tim fasilitator eksternal. Tim fasilitator internal merupakan tim yang sudah melekat pada bdang litbang untuk mengelola inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Tim fasilitator internal ini adalah bagian dari Tim Penilai Inovasi Kabupaten (TIPK) yang mana terdiri dari perangkat daerah

seperti Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas komunikasi dan informasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) dan sebagainya. Sedangkan tim fasilitator eksternal yaitu tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bapelitbang melalui bidang Litbang berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama. Tim fasilitator eksternal ini adalah tim yang ditunjuk dari perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama bersama Pemerintah Kabupaten Bintan. STISIPOL Raja Haji merupakan perguruan tinggi yang diberikan kepercayaan untuk menjadi tim fasilitator eksternal untuk membantu pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka mengidentifikasi, mendata, menggali serta memberikan pendampingan dan pembinaan inovasi daerah melalui kegiatan Fasilitasi Teknologi dan Inovasi (Fatoni). Berikut ini beberapa bentuk kegiatan pembinaan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bintan.

a. Fatoni (Fasilitasi Teknologi dan Inovasi).

Fasilitasi Teknologi dan Inovasi merupakan pemberian peluang kemudahan, bantuan, pendampingan, asistensi teknis, pelatihan dan penyelenggaraan beberapa kegiatan serta dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan peningkatan kapasitas dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Teknologi Inovasi ini adalah untuk memberikan pendampingan pelaksanaan Inovasi dan juga melakukan pembinaan inovasi yang telah dilaksanakan oleh stakeholders. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan pmdampingan ini sangat memberikan manfaat bagi Kabupaten Bintan dalam melakukan identifikasi dan pemtaan inovasi di setiap perangkat daerah.

Individu dan kelompok yang hadir pada kegiatan inovasi ini diberikan pemahaman sehubungan dengan inovasi daerah. Kegiatan pembinaan pada Fasilitasi Teknologi dan Inovasi juga sangat efektif dimana individu dan kelompok tidak hanya diberikan pendampingan hanya sekali. Sebagai contoh pada tahun 2022, bapelitbang telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Teknologi dan Inovasi sebanyak 4 kali secara officially dilaksanakan di ruang Studio Bapelitbang. Selain itu, kegiatan ini tidak mesti dilakukan melalui pertemuan formal yang sudah dijadwalkan oleh Baeplitbang melainkan bisa dilakukan secara fleksible dimana setiap individu dan kelompok yang memerlukan bimbingan dapat menghubungi tim fasilitator dan dapat menyesuaikan waktu sesuai dengan kesepakatan atas pengetahuan dari tim Pembina Bapelitbang.

b. Digitalisasi Pelayanan Layanan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah atau Layanan Indah).

Layanan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah) merupakan layanan penjangkauan inovasi dilakukan secara online melalui media whatsapp dan zoom meeting atau digitalisasi pelayanan sehubungan dengan pelaksanaan inovasi daerah. Layanan indah mempermudah para inisiator atau perangkat daerah yang ingin berkonsultasi terkait inovasi daerah yang ada. Sehingga Informasi dan koordinasi terkait inovasi daerah dapat terlaksana dengan cepat dan terkendali. Layanan Indah juga membuat para inisiator dan perangkat daerah yang berkewajiban melaporkan inovasinya menjadi lebih mudah memahami apa inovasi daerah itu sendiri. Bagaimana cara pelaporan dan pengusulannya dan data dukung apa saja yang dibutuhkan, karena mereka bebas untuk bertanya sampai kapan saja dan sampai mereka benar-benar memahami terkait inovasi daerah ini sendiri. Koordinasi dan konsultasi ini dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja hanya dengan memanfaatkan jaringan internet. Pembinaan dan pendampingan melalui Layanan Indah telah memberikan kemudahan bagi individu dan kelompok untuk mendapatkan informasi tentang inovasi daerah.

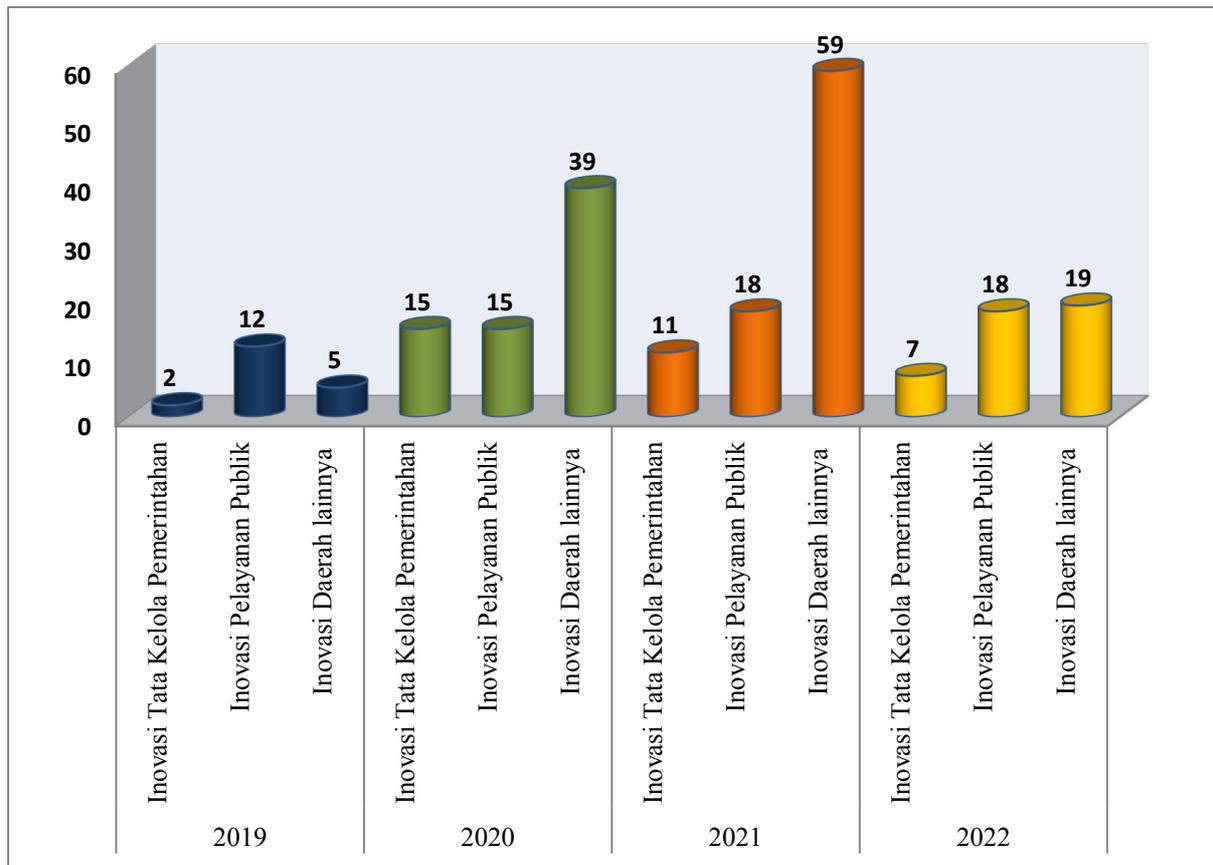
c. Road Show Inovasi Daerah Door to Door (RIDHO).

RIDHO merupakan penjangkauan inovasi melalui sosialisasi door to door atau lebih dikenal dengan istilah jemput bola. Pola jemput bola ini muncul karena adanya permasalahan dalam menerapkan inovasi daerah dimana pembinaan dan pendampingan yang dilakukan melalui Fatoni (Fasilitasi Teknologi dan Inovasi) dan Digitalisasi Pelayanan Layanan Indah (Layanan Gemilang Inovasi Daerah) tidak mampu menjangkau semuanya lini baik inovasi yang ada di pemerintahan maupun inovasi yang ada di masyarakat. Kegiatan ini untuk membantu menguraikan permasalahan pendampingan dan pembinaan inovasi daerah baik kepada individu maupun kelompok baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan maupun masyarakat Kabupaten Bintan.

2. Dampak Pembinaan Inovasi Daerah

Peran Bapelitbang melalui bidang litbang dalam menerapkan inovasi daerah di Kabupaten Bintan sangat besar. Sebagaimana telah dideskripsikan sebelumnya bahwa Pendekatan dan pemilihan layanan inovasi daerah melalui Tim fasilitator Inovasi Daerah merupakan bentuk pembinaan inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Bintan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

Grafik 3. Jumlah Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Berdasarkan Bentuk Tahun 2019-2022



Sumber: (Bapelitbang Kabaupaten Bintan & P3M STISIPOL Raja Haji, 2021).

Dampak pembinaan inovasi daerah telah memberikan dampak yang positif dimana keberlangsungan untuk berinovasi tetap terjaga terutama dalam menjaga agar setiap OPD menghasilkan 1 inovasi. Secara kuantitas inovasi Kabupaten Bintan mengalami peningkatan dalam 3 tahun dimana pada grafik. 3 menunjukkan data eksisting Inovasi daerah Kabupaten Bintan 2019-2022 mengalami pertumbuhan dari setiap bentuk setiap tahunnya. Bentuk inovasi Tata Kelola Pemerintahan mengalami naik dan turun sejak tahun 2019 – 2022. Pada tahun 2021, Inovasi mengalami peningkatan sebesar 20 %. Hasil pendataan tahun 2021 terdapat 83 inovasi daerah dengan melibatkan 29 OPD yang memberikan kontribusi dari eksistensi inovasi di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2022 secara keseluruhan terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun demikian, walaupun terjadi penurunan secara kuantitas namun Kabupaten Bintan masih mampu mempertahankan status sebagai Kabupaten terinovatif kategori daerah perbatasan pada tahun 2022.

Tabel.1 Jumlah Inovasi Daerah Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Bentuk Inovasi

Bentuk Inovasi						
No	Inovasi Pelayanan Publik		Inovasi Tata Kelola Pemerintahan		Inovasi Bentuk Lainnya	
	OPD	Jmlh	OPD	Jmlh	OPD	Jmlh
1	Dinas Sosial	2	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4
2	Dinas Kesehatan	1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
4	Puskesmas Teluk Sasah	2	Kecamatan Mantang	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1
6	RSUD Jabupaten Bintan	1	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Sekretariat DPRD	1	Dinas Pemuda dan Olahraga	1
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			Sekretariat Daerah Bagian Perbatasan	1
9	Satuan Polisi Pamong Praja	1			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
10	Kecamatan Bintan Pesisir	1			Kecamatan Mantang	1
11	Dinas Tenaga Kerja	2			Kecamatan Binta Timur	1
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1			Kecamatan Gunung Kijang	1
13	Badan Pendapatan Daerah	1				
14	Dinas Perhubungan	1				
15	Inspektorat	1				
	Total	19	Total	7	Total	18

Sumber: (Bapelitbang Kabupaten Bintan & P3M STISIPOL Raja Haji, 2022)

Berdasarkan Tabel. 1. menunjukkan keterlibatan OPD pada ketiga bentuk inovasi daerah yaitu terdapat sebanyak 15 OPD pada bentuk inovasi pelayanan publik yang memberikan kontribusi atas pendataan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Bapelitbang. Selanjutnya, untuk bentuk inovasi tata kelola pemerintahan berjumlah sebanyak 7 OPD serta untuk Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdapat sebanyak 12 OPD. Keterlibatan OPD yang ada di Kabupaten Bintan dalam menghasilkan inovasi tumbuh dengan baik. Hanya saja berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan data administrasi yang diperlukan dalam keikutsertaan penilaian indeks inovasi daerah (IID) dan innovation government award (IGA) masih menjadi permasalahan setiap tahunnya. Namun demikian, dengan adanya kegiatan pembinaan ini tentunya dapat membantu OPD dalam melengkapi kekurangan data tersebut. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa bimbingan teknis dan pendampingan penyiapan dokumen kelengkapan data administrasi inovasi. Sehubungan dengan pembinaan inovasi daerah maka ke depan pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk menjangkau dan memetakan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat, sektor pendidikan seperti sekolah dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.

3. Galanova Award Kabupaten Bintan

Galanova Award merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan kepada pelaksana Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Bapelitbang Kabupaten Bintan (24 Desember 2021)). Adapun upaya yang diinginkan melalui Galanova award ini adalah untuk memberikan semangat dan memacu seluruh OPD untuk berinovasi setiap tahunnya. Bagi OPD yang memenangkan kompetisi Indeks Inovasi Daerah akan diberikan insentif untuk melakukan pengembangan dan bahkan diharapkan dapat untuk menciptakan inovasi yang baru dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang bertujuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bintan. Komitmen pemerintah Kabupaten Bintan terhadap pemenang anugrah Galanova Award mendapatkan reward berupa penghargaan atau uang dana insentif pembinaan inovasi daerah. Hal tersebut telah dianggarkan pemerintah pada tahun 2022 melalui kebijakan APBD-P. hal ini tentu sejalan dengan penyampaian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri bahwa Pemberian penghargaan dan dana insentif daerah bidang inovasi daerah, sebenarnya bukanlah hasil akhir dari kegiatan inovasi melainkan hanya sebagai pemicu agar daerah melakukan inovasi yang pada gilirannya kualitas pelayanan masyarakat meningkat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, 2020).

4. Tantangan Pembinaan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan

Pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bintan diawali dengan penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai instrumen untuk melaksanakan inovasi daerah (Bapelitbang, 2019a; Matrudi et al., 2021). Selanjutnya, pendataan inovasi daerah juga dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2019 sebagai langkah awal dan telah teridentifikasi sebanyak 19 inovasi daerah (Bapelitbang, 2019b; Matrudi et al., 2021). Pada tahun 2019 pendataan masih dilakukan secara parsial oleh bidang litbang. Mulai dari tahun 2020, 2021 dan 2022 pendataan inovasi dilakukan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Adapun hasil yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Bintan adalah meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai kabupaten terinovatif kategori daerah perbatasan selama 2 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Untuk tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh penyelenggara. Innovative Government Award (IGA) ini sendiri diselenggarakan oleh Kemendagri. Selain itu, Capaian lain atas pelaksanaan inovasi daerah adalah pada tahun 2022 Kabupaten Bintan berhasil meraih penghargaan TOP 45 pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB. Capaian-capaian ini tentu tidak didapatkan dengan mudah oleh Kabupaten Bintan. Ada berbagai macam rangkaian kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk memacu

daerah untuk tetap berinovasi dan harus berinovasi dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kegiatan pembinaan terus dilakukan dengan berbagai pendekatan namun tetap ada permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan dalam membina agar keberlanjutan inovasi daerah bisa menjadi budaya kerja.

Beberapa tantangan yang muncul dalam pembinaan inovasi daerah di Kabupaten Bintan yaitu tanggung jawab pengelola inovasi selalu dibebankan kepada inisiator inovasi dan tidak adanya regenerasi pengelola terhadap inovasi yang ada. Selanjutnya, peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi tidak mengikuti dengan totalitas dimana saat dilakukan pemantauan dan penagihan data dukung yang dapat berupa proposal inovasi dan dokumen yang bersifat administratif tidak dapat disediakan. Ini bukan berarti bahwa OPD atau instansi peserta tidak memiliki Inovasi atau belum mampu berinovasi melainkan tidak adanya komitmen untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menetapkannya sebagai sebuah inovasi sebagaimana yang telah diatur didalam Perbup No.48 tahun 2020. Selain itu, adanya placement dan replacement pegawai dapat menyebabkan keberlanjutan pelaporan inovasi daerah menjadi terhambat dimana pengelola yang selanjutnya tidak memahami secara menyeluruh yang berkaitan dengan inovasi daerah. Hal ini disebabkan setiap peserta yang mengikuti sosialisasi tidak melakukan diseminasi pada instansi masing-masing. Ini tentunya menjadi tambahan pekerjaan bagi Bapelitbang dimana harus memulai dari awal untuk melaksanakan pembinaan inovasi daerah.

Secara umum, kegiatan sosialisasi inovasi daerah dengan jumlah frekuensi yang banyak tentunya telah memberikan dampak informasi tentang pentingnya berinovasi. Pemahaman terhadap pelaksanaan inovasi daerah harusnya sampai pada semua lini. Namun demikian, faktanya masih terdapat individu dan perangkat daerah yang belum memahami pentingnya berinovasi. Permasalahan berikutnya adalah jika ada pegawai yang berinovasi namun tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan. Selain itu, ada fenomena bahwa penanggungjawab inovasi selalu identik atau melakna kepada orang yang memiliki ide inovasi sehingga jika terjadi rotasi dan mutasi pegawai dapat menyebabkan keberlangsungan inovasi jadi terhambat bahkan tidak berjalan. Ini merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam memelihara dan menerapkan inovasi daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan yang dilaksanakan oleh Bapelitbang telah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada dapat dioptimalkan untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh

stakeholders seperti OPD, ASN, DPRD dan Masyarakat di Kabupaten Bintan. Sosialisasi yang masif yang dilaksanakan secara individu dan kelompok, dilaksanakan secara offline dan online, adanya tim fasilitasi inovasi yang melibatkan akademisi, kegiatan Galanova sebagai ajang pemberian reward merupakan metode yang diterapkan oleh Bapelitbang untuk tetap menjaga budaya Inovasi tetap tumbuh di Kabupaten Bintan. Namun demikian, terdapat inovasi yang bertahan hanya sementara dan tidak ada keberlanjutan yang disebabkan karena faktor pengelola inovasi. Oleh karena itu, perlunya komitmen OPD dan individu (pegawai) untuk menjaga iklim inovasi. bukan hanya menghasilkan inovasi yang baru tetapi juga menjaga dan merawat yang sudah ada merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan capaian maka diperlukan komitmen dari setiap stakeholders. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya tetap harus dilaksanakan. Bagi tim Bapelitbang, Pendekatan pembinaan dengan berbagai model seperti Fatoni, Ridho dan layanan pengaduan inovasi daerah (Lagu Indah) untuk dipertahankan dan bagi seluruh stakeholders dapat memanfaatkan layanan tersebut sebagai saluran untuk mendapatkan pengetahuan sehubungan dengan pelaksanaan Inovasi Daerah.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai Program Penelitian Pembinaan – Penelitian Dosen Pemula, LLDIKTI Wilayah X dan Kampus STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Kemendagri., (2020). *Pembinaan Inovasi Daerah*. Jakarta: Bina Praja Press.
- Bapelitbang. (2019a). *Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Bintan*.
- Bapelitbang Kabupaten Bintan & P3M STISIPOL Raja Haji. (2021). *Laporan Akhir Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2021*.
- Bapelitbang Kabupaten Bintan & P3M STISIPOL Raja Haji. (2022). *Laporan Akhir Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Bintan Tahun 2022*.

- Bapelitbang. (2019b). *Profil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019*.
- Bianchi, C., & Steele, M. (2014). *Coaching For Innovation: Tools and Techniques For Encouraging New Ideas In The Workplace*. Palgrave MacMillan.
- Budiman, S, Junriana, J., & Matriddi, R. A. (2022). An Analysis of Dynamic Governance Capability in Innovation Development in Bintan Regency. *Aristo*, 10(3): 513–537.
- Budiman, S., Kurniadi, D., Matriddi, R. A., Jenawi, B., & Junriana. (2021). Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2): 112–126. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1839>
- Cornell University, INSEAD, dan World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). *Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?. 13th Edition*. Geneva 20, Switzerland: World Intellectual Property Organization (WIPO).
- Cornell University, INSEAD, dan World Intellectual Property Organization (WIPO). (2021). *Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. 14th Edition*. Geneva 20, Switzerland: World Intellectual Property Organization (WIPO).
- Matriddi, R. A., Budiman, S., Ferizone, Faizal Rianto, Setyadiharja, R., & Kurniadi, D. (2021). Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)*, 04(01): 42–54.
- Negeri, B. P. dan P. K. D. (2020). Peta Pembinaan Inovasi Daerah. In Sukaca, A. Yanuarko, J. Tambunan, & J. Welo (Eds.), *Bappedaberau.com*. Bina Praja Press. <http://bappedaberau.com/inovasi-daerah/>
- Noor, I. (2013). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
- Pramudita, A. (2020). Mengapa Kita Harus Berinovasi ? In G. O. Nurharyoko, A. Pramudita, & RH Bambang B. Nugroho (Eds.), *Inovasi Birokrasi - Membuat Kerja Birokrat Lebih Bermakna* (p. 219). Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahman, F., & Tarigan, J. S. . (2020). *Inovasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*. Instrans Publishing.
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jap*, 2(4): 641–647.
- Resen, M. G. S. K. (2015). Inovasi Daerah (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di

Indonesia). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(4): 680–687.

- Roša, A., & Lace, N. (2018). The open innovation model of coaching interaction in organisations for sustainable performance within the life cycle. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su10103516>
- Sobandi, B. (2019). Model Pengembangan Inovasi Berbasis Pola Fikir Dan Komitmen Pejabat Publik. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–6.
- Sumirat, F. (2019). Analisis Inovasi Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengurangan Kesenjangan Wilayah. *Bappenas Working Papers*, 2(2): 270–293. <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i2.45>
- Taufiqurrahman, Udisubakti Ciptomulyono, & Gunawan, J. (2011). Model Pembinaan Dan Pengembangan Kemampuan Inovasi Produk Dan Peran Intermediary Pada UKM Kerajinan Dengan Pendekatan Structural Equation Modelling (SEM). *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XIII*, 1–10.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.